

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian selama berada di Kecamatan Gedeg, bahwasanya pelaksanaan *good governance* dalam pelayanan publik dapat dilihat dari 8 (delapan) prinsip *good governance* sesuai dengan UNDP (*United Nation Development Program*). Ke delapan prinsip tersebut meliputi, prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada kesepakatan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategi. Dari ke delapan prinsip tersebut 6 (enam) diantaranya telah diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Gedeg. sehingga pelayanan di Kantor Kecamatan Gedeg dapat dikatakan sudah baik akan tetapi, masih memerlukan suatu evaluasi dalam penerapan *good governance* agar lebih maksimal.

Dalam hal ini, keberhasilan pemerintah dalam melakukan pelayanan serta dalam menyalurkan BLT Covid 19 dapat didorong oleh adanya komitmen dari pemimpin untuk dapat mereformasi birokrasi menjadi lebih baik, kesadaran dari aparatur pegawai untuk berubah menjadi lebih baik dan adanya aturan yang dapat mendukung terselenggaranya *good governance*. Namun, masih perlu adanya evaluasi dari pemerintah kecamatan Gedeg terkait ketertiban masyarakat dalam mengambil BLT di kecamatan dalam masa pandemi covid 19. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk bisa tertib dan mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan dapat menumbuhkan covid ditengah kerumunan. Untuk itu, pemerintah

harus bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan covid, polsek, Babinkatibnas serta perangkat desa untuk memberikan sanksi bagi warga yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak baik itu berupa teguran maupun berupa push up. Sehingga, dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu: dapat mencegah penularan covid 19 dengan cepat, yang menerima BLT agar lebih tepat sasaran, serta masyarakat agar lebih patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Gedeg dengan memberikan pendekatan-pendekatan yang baik yang dilakukan oleh perangkat desa. Karena pemerintah kecamatan tidak akan mampu mengkondisikan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Gedeg dengan sendirinya, pastinya membutuhkan peran dari perangkat desa. Koordinasi antara pihak kecamatan Gedeg dengan perangkat desa untuk menertibkan masyarakat dengan memberikan pemahaman yang baik. Dalam hal ini, memberikan pendekatan yang baik bahwasannya hari ini kita sedang mengalami musibah pandemi covid 19. Maka dari itu, kita harus mengerti dan memahami bahwa aturan tersebut diciptakan untuk melindungi masyarakat agar tidak terkena dampak dari covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Agus Pramusinto, Erwan Agus Purwanto. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. 2009
- Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. 2014
- Joko Widodo. *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia. 2001
- Komarudin. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Penerbit: Genesindo. 2014
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modem English Perss. 2002
- Rina Martini. *Birokrasi dan Politik*. Cetakan Pertama. Semarang: UPT UNDIP Press. 2012
- Sedarmayanti. *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Bandung: Refika Aditama. 2009
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2004
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Kedua Edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" & Good Corporate Governance "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik" Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju. 2012
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta. 2012
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 1996

Toha Miftah. *Birokrasi & Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

Tri Yuniningsih. *Kajian Birokrasi*. Cetakan pertama. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press FISIP-UNDIP. 2019

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Zaenal Mukarom, Muhibudin wijaya laksana. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015

Referensi Jurnal

In Masniyah. *Aplikasi Teori Birokrasi dan Patologi Max Weber pada Pemerintahan Desa Kerangkulon Wonosalam Demak Pada Tahun 2013-2017*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2018

Neneng Siti Maryam. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Politeknik Kridatama Bandung. 2016

Referensi Berita

Misti P. *Inovasi Layanan Publik 'Rawon Bu Gimal' Dikenalkan Kecamatan Gedeg*. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/inovasi-layanan-publik-rawon-bu-gimal-dikenalkan-kecamatan-gedeg/> (diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 18:37 WIB)

Moch Prima F. *Jawa Timur terpilih jadi Provinsi dengan Pelayanan Publik Terbaik*. <https://m.detik.com/news/berita/d-4212782/jawa-timur-terpilih-jadi-provinsi-dengan-pelayanan-publik-terbaik>. (diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 10:08 WIB)

Willy Irawan. *Pemkot Mojokerto Komitmen Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat*. <https://jatim.antaranews.com/berita/285533/pemkot-mojokerto-komitmen-tingkatkan-pelayanan-kepada-masyarakat> (diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 17:15 WIB)

Referensi Wawancara

Wawancara dengan Henry Davidson selaku Kasi Pemerintahan, 10 Juni 2020,
Pukul 10.15 WIB

Wawancara dengan Kusnadi selaku Kasi Kemasyarakatan, 20 Agustus 2020,
Pukul 09.00 WIB

Wawancara dengan M. Taufiqurrohman selaku Sekretaris Camat, 4 Juni 2020,
Pukul 08.30 WIB

Wawancara dengan Rul Istirahayu selaku Kasi Pelayanan, 4 Juni 2020, Pukul
09.10 WIB

Wawancara dengan Sulkan selaku Anggota Kasi Pemerintahan pada 19 Agustus
2020, Pukul 12.00 WIB

